

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN PESANTREN

THE EMPOWERMENT OF WOMEN IN EDUCATION OF PESANTREN

Dwi Ratnasari

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ratnasari_dwi@yahoo.com

Abstrak:

Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah pembangunan kesadaran tentang dirinya berikut kemampuan untuk mandiri dalam menentukan kehidupan dirinya sebagai manusia, tanpa ketergantungan, ketertekanan dan diskriminasi. Islam sejak awal telah menegaskan transformasi tanpa menyamakan dengan laki-laki. Pendidikan merupakan instrumen penting transformasi yang dimulai dari pengetahuan untuk membangun kesadaran. Pesantren sebagai pendidikan Islam memiliki peran dalam proses ini. Karena pesantren mengajarkan ilmu-ilmu yang berlandaskan ajaran agama sehingga membentuk kesadaran dan tindakan berdasar agama. Hanya saja, masih terdapat beberapa persoalan terkait dengan kurikulum, materi dan metode pendidikannya. Karena pesantren mendasarkan materi dan kurikulumnya pada penjelasan kitab kuning yang merupakan penafsiran para ulama atas Kitab Suci Alquran dan hadis. Kandungan kitab kuning oleh sementara peneliti mengindikasikan diskriminasi gender seperti dalam *'Uqūd al-Lujjain* yang merupakan pegangan hamper di semua pesantren tradisional. Dalam hal ini, pesantren perlu berinteraksi dengan keilmuan modern dalam isu gender sehingga melahirkan sensitivitas gender. Selain itu, juga perlu ada pengenalan dengan pembelajaran kritis dan peningkatan profesionalisme guru. Dengan itu, proses pendidikan pesantren akan lebih memberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pesantren, Perempuan, Islam

Abstract:

Empowerment means building awareness about women's ability to independently determine their life as a human being, without dependence, distress and discrimination. since its inception, Islam has affirmed transformation of women without equate with men. Education is an important instrument of the transformation that starts from knowledge to build awareness. The Pesantren (Islamic Boarding school) has a role in this process. Because it's teachings are based on the teachings of religion to form awareness and attitude based on the religion. However, there are some problems in the curriculum, materials and education methods. Because the curriculum and materials of pesantren based on the explanation in yellow books which are the interpretation of the Muslim scholars on The Holy Koran and Al-Hadith. While, The contents of the yellow book are indicated gender discrimination by some researchers, like the *'Uqūd al-Lujjain* which is become foundation of almost all traditional pesantren. In this case, pesantren need to interact with modern knowledge in gender issues in order to create gender sensitivity. In addition, they need an introduction to the critical learning and improvment the professionalism of the teachers. With that, the education process of pesantren will be more empowered, progressive and in line with the principles of Islam.

Keywords: Empowerment, pesantren, women, Islam

Pendahuluan

Islam hadir di muka bumi ini tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, kecondongan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian terhadap jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban pada laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki. Pada saat yang sama keadilan juga tidak memberi ruang kepada laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang memiliki hak penuh atas perempuan. Inilah prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan nilai universal ajaran Islam.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia bertugas untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang universal tersebut. Tatapan Islam yang sangat memberdayakan perempuan tersebut berimplikasi pada pola pengembangan pendidikan yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Dengan demikian idealnya pendidikan pesantren diorientasikan untuk mengarahkan, membimbing dan menuntun anak perempuan sebagai peserta didik, supaya mampu berdiri sendiri atau mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang diungkapkan John Dewey, bahwa melalui pendidikan setiap individu seharusnya memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan yang berarti.¹

Mansour Fakih menegaskan bahwa pada dasarnya tugas pendidikan adalah membangkitkan kesadaran kritis yang akan mendorong masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan menyetop ketidakadilan.² oleh karena itu pendidikan pesantren

¹ Sidney Hook, "Filsafat Pendidikan John Dewey" dalam *Sidney Hook: Sosok Filsuf Humanis, Demokrat dalam Tradisi Pragmatisme*, ed. ed. Paul Kurtz (Jakarta: YOI, 1994), 202.

² Mansour Fakih, "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi 5 1999, 52.

mustinya mampu membangkitkan kesadaran kritis peserta didiknya. Dengan penyadaran ini diharapkan perempuan dapat menganalisis secara kritis keadaan yang terjadi di sekelilingnya,³ sehingga perempuan dapat mengetahui praktek-praktek diskriminasi yang merugikan mereka.

Hal ini diinspirasi oleh pemahaman bahwa Islam secara konseptual sebagaimana tertuang dalam kitab suci dan secara praksis sebagaimana dicontohkan oleh Nabi mengandung nilai-nilai universal yang memberikan ruang yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam pentas kehidupan. Karena perjalanan waktu dan pemahaman umatlah yang menyebabkan tampilan Islam seolah-olah merendahkan perempuan. Padahal jika ditilik dari sumber kitab suci dan risalah kenabian dalam Islam, tidak dimungkiri bahwa Islam adalah agama yang sangat revolusioner dalam menempatkan posisi perempuan yang sebelumnya sangat dihinakan oleh tradisi jahiliah.

Pemberdayaan: Dari Kesadaran menuju Martabat

Dalam Bahasa Indonesia istilah “pemberdayaan” belum memperoleh pembakuan, tapi dalam bahasa Inggris kata “empowerment” diartikan dengan penguatan. Dengan demikian “pemberdayaan” dapat diberi batasan luas sebagai penguasaan atas aset material, sumber-sumber intelektual dan ideologi.⁴ Menurut Mansour Fakih, gerakan pemberdayaan perempuan yang juga disebut dengan gerakan transformasi gender tidak hanya sekedar bertujuan memperbaiki status perempuan dengan menggunakan indikator norma laki-laki, tapi lebih dari itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan,⁵ sehingga perempuan dapat menjadi

³ Pinky Saptandari, “Tantangan dan Peluang Gerakan Perempuan dalam Menyongsong Otonomi Daerah,” dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 6 No. 1, Februari, 2001, 98.

⁴ Melly G Tan, “Perempuan dan Pemberdayaan,” dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*, ed. Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 9.

⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 166.

manusia yang mampu mengontrol dan memberi arah pada kehidupannya sendiri.⁶

Pemberdayaan perempuan yang berusaha menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki, dan tidak pula berarti upaya untuk menyaingi atau melawan laki-laki. Kesetaraan gender harus dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama, berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk dapat merealisasikan potensinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Pemberdayaan perempuan sangat mengedepankan persoalan kemandirian perempuan agar tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Kemandirian sejati memberikan kekuatan untuk melakukan tindakan yang lahir dari kematangan berpikir, lahir dari visi bahwa perilaku kita adalah hasil pilihan sadar yang berdasarkan nilai dan bukan hasil dari kondisi dan pengkondisian.⁷

Perempuan yang mandiri boleh saja memilih menjadi ibu rumah tangga yang sepenuhnya menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus anak-anak dan suami, bukan karena tuntutan ataupun aturan turun temurun yang sudah digariskan oleh nilai adat, penafsiran terhadap ajaran agama atau nilai apa saja, tetapi karena memang itu adalah prioritas utamanya, pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip hidupnya. Begitu pula ketika perempuan memutuskan untuk memilih berkarir, bukan karena ingin dikatakan perempuan maju dan mandiri semata, melainkan karena pilihan dasar yang dibuatnya berdasarkan visi yang bertanggung jawab. Perempuan merasa perlu ikut

⁶ Saparinah Sadli, "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM," dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, ed. Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 22.

⁷ Ariyana Wahidah Fuad, "Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. Mursyidah Tahir (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000), 77-78.

berorganisasi bukan karena jabatan suaminya, tapi lebih karena kebutuhan untuk mengembangkan potensi kemandiriannya.⁸

Adapun mengenai hal-hal yang menyebabkan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan perempuan, di antaranya adalah kebodohan. Kebodohan akan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan karena mereka tidak bisa memahami bagaimana praktek-praktek diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial itu menimpa diri mereka, tidak tahu hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, tidak tahu apa itu peran kodrati dan apa itu peran gender, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

Agar perempuan dapat mengaktualisasikan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, mandiri dan dapat melakukan fungsi dan perannya dengan baik maka perempuan harus berpendidikan cukup. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan sangat diperlukan agar mereka bisa mengejar berbagai ketertinggalannya selama ini.⁹ Dengan demikian berarti bahwa pemampuan intelektual menjadi sangat penting dan ini merupakan hal yang niscaya dalam proses pemberdayaan.

Proses penyadaran perempuan dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Sebagaimana diungkapkan oleh Kartini bahwa pendidikan adalah sarana yang memungkinkan perempuan untuk dapat berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Melalui pendidikan, aspek kognitif perempuan akan terbuka, intelektualitasnya terasah sehingga dapat berpikir kritis, dapat mewujudkan potensi dan kreativitasnya, termotivasi untuk maju dan meraih prestasi, berkarir dan memperoleh martabat layaknya laki-laki.¹⁰ Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan pembuka yang memungkinkan perempuan dapat berkkiprah di dunia yang luas,

⁸ *Ibid*, 78.

⁹ A. Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasaan dalam Meningkatkan martabat dan Kesejahteraan Perempuan" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. Mursyidah Tahir (Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000), 24.

¹⁰ Kartini, *Surat-surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya* (Jakarta; Djambatan, 1987), 8.

dapat mengikuti perubahan yang terus menerus berlangsung, dan memiliki posisi serta peran sosial dan intelektual.

Dengan demikian maka upaya penyadaran terhadap hak-hak perempuan, kemampuan serta potensinya merupakan hal yang niscaya dalam usaha pemberdayaan perempuan.¹¹ Dengan itu mereka bisa memperluas jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Sebagai pengasuh dan pendidik utama dari anak-anaknya, pendidikan kaum perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu pendidikan bagi kaum perempuan adalah hal yang sangat penting.¹² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan perempuan adalah usaha mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri perempuan secara utuh, baik unsur intelektualitas, kepribadian maupun ketrampilan.

Perempuan dan Pemberdayaan Islami

Sebelum kedatangan Islam, kaum perempuan berada di bawah kezaliman kaum laki-laki, diperjualbelikan laksana binatang dan barang, tidak memperoleh hak-haknya serta tidak mendapatkan kedudukan yang seharusnya dimiliki dalam masyarakatnya. Perempuan juga sama sekali tidak berhak mendapatkan pendidikan, harus tinggal di rumah saja sehingga tidak punya andil dalam menentukan kehidupannya, diwarisi dan tidak mewarisi. Sebelum kedatangan Islam, perempuan sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk menikmati kehidupannya.

Setelah kedatangan Islam, hal-hal yang berkaitan dengan perempuan menjadi lebih baik. Islam mengangkat hak dan

¹¹ A. Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasaan," 24.

¹² Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 288.

martabat kaum perempuan, hal yang belum pernah dilakukan oleh agama-agama sebelumnya, bahkan oleh undang-undang manapun. Islam juga memberi perhatian khusus pada perempuan, terbukti dengan ditetapkannya perempuan sebagai salah satu nama salah satu surat dalam Alquran, yaitu surat an-Nisa. Sebagian besar ayat-ayat dalam surat ini membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, terutama masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.¹³

Islam datang mengikis tradisi masyarakat jahiliah yang sangat melecehkan perempuan. Begitu banyak norma-norma Islam yang berusaha untuk mengembalikan kehormatan perempuan, menghargai jasa serta pengorbanannya serta menempatkannya secara proporsional. Ketika masyarakat jahiliah merasa malu bila punya anak perempuan, Nabi Muhammad saw menjanjikan surga bagi mereka yang mampu merawat tiga anak perempuan dengan baik. Islam memberikan hak-hak yang setara bahkan dalam bidang spiritual sekalipun.

Namun demikian Islam tidak menghapus arti pentingnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi struktur fisik, yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.¹⁴ Sebagaimana diilustrasikan oleh Alquran dengan perbedaan siang dan malam yang keberadaan keduanya menjadi satu kesatuan dari ketetapan dan ketentuan Allah (sunatullah).¹⁵

Sebagai konsekuensi logisnya, perbedaan struktur fisik ini membawa perbedaan fungsi, tugas termasuk perbedaan hak dan kewajiban. Meskipun sama-sama mukalaf tapi dengan takaran yang berbeda. Misalnya karena fungsi reproduksinya, perempuan mengalami haid, hamil, nifas, menyusui, sementara laki-laki tidak, Alquran mengatur ketentuan hukum yang

¹³ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cicik Farha (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 31-32.

¹⁴ Sugeng Sugiyono, "Konsepsi Gender dalam Perspektif Islam" (makalah yang disajikan dalam Seminar Sehari dengan tema Re-interpretasi Peran Gender dalam Perspektif Islam, oleh KPSW BPP3M IAIN Sunan Kalijaga, 1994), 3.

¹⁵ Q.S. Yasin: 36.

berbeda antara kedua jenis kelamin tersebut, baik dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah reproduksi maupun yang menyangkut kewajiban-kewajiban lain, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, individual maupun sosial.

Perempuan yang sedang haid dan nifas dibebaskan dari kewajiban shalat tanpa harus menggantinya di hari yang lain. Perempuan yang menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan dapat menggantinya dengan *fidyah*, menurut sebagian ulama. Karena perempuan mempunyai keterbatasan disebabkan oleh tugas reproduksi yang dipikulnya, perempuan dibebaskan dari kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, dan tugas itu diberikan kepada laki-laki (suaminya).¹⁶

Dalam Alquran memang tidak dijelaskan mengenai konsep peran yang khusus untuk laki-laki maupun perempuan, kecuali dalam batas-batas yang menyangkut hal-hal yang sangat khas untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak, sambil menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan saling tolong menolong. Alquran cenderung mempersilahkan kepada kecerdasan masing-masing manusia untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai dan harmonis. Yang menjadi perhatian Alquran adalah adanya jaminan keamanan terhadap mereka, lebih-lebih jaminan terhadap pelecehan atas mereka, baik atas nama norma agama maupun norma sosial.¹⁷

Di antara upaya Alquran dalam menghargai dan memberdayakan kaum perempuan adalah, *pertama*, larangan membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Apapun alasannya Islam melarang keras tradisi biadab ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat jahiliah melakukan hal tersebut karena ketakutan akan beban

¹⁶ Yunahar Ilyas, "Perspektif Gender dalam Islam" (makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "Bias Gender dalam Dakwah," oleh PSW UII dan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), 2.

¹⁷ M. Quraish Shihab, "Kesetaraan Gender dalam Islam" kata pengantar *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, oleh Nasarudin Umar, (Jakarta: Paramadina, 1999), xxxvii

ekonomi¹⁸ dan ketakutan akan kehinaan.¹⁹

Kedua, hak mendapatkan warisan. Sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak memiliki hak apapun, termasuk terhadap dirinya sendiri, bahkan perempuan dijadikan sebagai hak milik yang diwariskan. Islam datang mengubah tradisi ini dengan memberikan bagian setengah dari bagian laki-laki.²⁰ Secara tekstual ketentuan ini terkesan diskriminatif tapi secara kontekstual dengan melihat kondisi sosio historis saat ayat diturunkan, perubahan tersebut sangat revolusioner, karena mendobrak tradisi yang sudah mapan di kalangan bangsa Arab saat itu.

Ketiga, batasan poligami. Poligami merupakan solusi sementara bagi perkawinan tak terbatas menuju perkawinan monogami yang lebih menjamin keadilan. Islam membatasi poligami maksimal empat orang istri.²¹ Jika dilihat dari konteks sejarahnya, pembatasan ini merupakan pengurangan yang cukup drastis dari tidak ada batasan sama sekali menjadi empat.

Keempat, dari segi pengabdian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pengabdian. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Alquran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pahala dan balasan berupa jaminan kehidupan yang baik atas amal shaleh yang telah dikerjakan.²²

Kelima, hak mendapatkan pendidikan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh pendidikan. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin.²³ Alquran memberikan pujian bagi mereka yang mau berpikir dan berdzikir tentang fenomena alam semesta ini.

¹⁸ QS al-An'am: 151 dan QS al-Isra: 131.

¹⁹ QS an-Nahl: 58-59.

²⁰ QS. An-Nisa: 10.

²¹ QS. An-Nisa: 34.

²² QS. An-Nisa: 32, an-Nahl: 97, al-Mukminun: 40.

²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Dal al-Fikr al-Arabi, t.t.), 81.

Pesantren Sebagai Model Pendidikan Islam

Salah satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia yang secara historis memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah pesantren.²⁴ Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan di mana nilai-nilai moral Islam diajarkan, dipahami, dihayati dan diamalkan serta dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari.²⁵ Ajaran Islam yang disampaikan berupa Alquran dan hadis, disamping juga beberapa kitab klasik yang disebut kitab kuning.²⁶

Adapun mengenai tujuan didirikannya pesantren pada dasarnya terbagi menjadi: (1) tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, (2) tujuan umum yaitu membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup mengamalkan ilmunya dan menjadi mubalig bagi masyarakatnya.²⁷ Melihat tujuan tersebut jelas bahwa pesantren merupakan lembaga yang berusaha mencetak insan yang ber-*tafaqquh fi ad-dīn*, dan menyebarkan misi-misi Islam demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam.

Sementara dalam hal penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajarannya, tampaknya antara satu pesantren dengan pesantren lainnya cukup bervariasi. Namun demikian secara

²⁴ Selain "pesantren" ada beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk jenis lembaga yang kurang lebih memiliki ciri-ciri yang sama, di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya menggunakan istilah "pondok" atau "pondok pesantren". Sementara di Minangkabau menggunakan istilah "surau" dan di Aceh "rangkah meunasah". Soegarda Purbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982) hlm. 279. M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan" dalam *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995), 2.

²⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 55.

²⁶ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 17. Kitab Kuning adalah buku-buku klasik berisikan tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra modern. Yang dimaksud kitab kuning dalam tulisan ini adalah kitab kuning yang secara luas dan populer digunakan oleh kalangan pesantren tradisional.

²⁷ HM. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara:1991), 248.

garis besar dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: (1) Pesantren Tradisional yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning. Di antara pesantren ini ada yang mengelola madrasah bahkan juga sekolah umum mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Murid-murid atau mahasiswa boleh tinggal di pondok atau di luar tetapi mereka harus mengikuti pengejaran kitab dengan cara sorogan maupun bandungan, sesuai dengan tingkatan masing-masing. (2) Pesantren Modern yang mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal dan sekolah ke dalam pondok pesantren. Semua santri yang masuk pondok terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab tidak lagi menonjol, melainkan berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi. Cara sorogan dan bandungan mulai berubah bentuk menjadi bimbingan individual dalam hal belajar dan kuliah umum atau stadium general.²⁸

Dari kedua tipologi tersebut, tampaknya sebagian pondok pesantren tetap mempertahankan bentuk pendidikannya yang asli dan sebagian lagi mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan zaman dan perkembangan pendidikan yang ada di tanah air. Karena itulah, dewasa ini di samping terdapat pesantren dengan karakteristik tradisionalnya, banyak bermunculan juga pesantren-pesantren modern.²⁹

Dalam perkembangannya ciri khas yang terdapat dalam pesantren itu sendiri tetap tampak. Zamakhsyari Dhofier³⁰

²⁸ Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1996), 65. Amal Fathullah Zarkasyi, "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan dakwah" dalam Adi Sasono Dkk. *Solusi Islam atas Problematika Umat, Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 103-104.

²⁹ Abdullah Syukri Zarkasyi membagi kriteria pondok pesantren menjadi tiga yaitu tradisional, modern dan perpaduan antara tradisional dan modern. Menurutnya jenis pesantren tradisional sudah banyak yang berubah, mereka sudah memakai sistem modern meski tidak meninggalkan tradisi yang lama. Jenis inilah yang kemudian banyak dijumpai yaitu pesantren yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Abdullah Syukri Zarkasyi, "Langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*, ed. Abdul Munir Mulkhan (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 1998), 220.

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan*

menyebutkan setidaknya ada lima elemen terbentuknya sebuah pesantren, yaitu kiai yang menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan pendidikan di pesantren, adanya santri yang bermukim (bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama) untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, adanya masjid yang digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan proses belajar mengajar, adanya pengajaran kitab-kitab klasik atau yang biasa disebut dengan kitab kuning, serta adanya pondokan atau asrama yang dijadikan sebagai tempat bermukim para santri untuk menuntut ilmu.³¹ Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan yang lain.

Problematika Pemberdayaan di Pesantren

Pondok pesantren sebagai pusat transmisi dan diseminasi ilmu-ilmu keislaman selama ini sering dikesankan sebagai sarang konservatisme, kejumudan dan cenderung eksklusif karena resisten terhadap nilai-nilai yang datang dari luar,³² termasuk di dalamnya nilai-nilai feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena eksklusifitasnya ini, pendidikan pesantren masih sarat dengan nilai-nilai yang bias gender.

Selain itu, ada juga yang menilai proses belajar mengajar yang selama ini ada di pesantren mengakibatkan outputnya terkesan berwatak lamban, pasif, kurang peka terhadap masalah karena *critical thinking* dan *abstract thinking*-nya sangat terbatas dan kurang dilatih.³³ Akibatnya meski jalur pendidikan dapat dijadikan sebagai wahana untuk memberdayakan perempuan, namun pendidikan pesantren yang terjadi selama ini masih belum memberdayakan perempuan. Hal ini dapat dilihat melalui

Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

³¹ *Ibid*, 47-49.

³² Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 90.

³³ M. Rofangi, "Posisi Kiai dalam pengembangan Tradisi Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 1998), 82.

beberapa hal diantaranya adalah kurikulum yang tidak sensitif gender dan metode pendidikan yang masih bersifat indoktrinasi.

Pertama, di kalangan pesantren tradisional masih terdapat keyakinan bahwa ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning merupakan pedoman hidup yang relevan. Dalam persoalan hubungan laki-laki dan perempuan, kitab kuning yang menjadi rujukan utama hampir semua pesantren di Indonesia adalah kitab *'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* karya Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani.³⁴ Menurut Naqiyah Mukhtar dalam kajiannya terhadap kitab tersebut, terdapat indikasi adanya kesan ketidaksesuaian antara kandungan kitab tersebut dengan kandungan Alquran yang autentik.³⁵

Menurut Masdar F. Mas'udi, kitab kuning yang secara umum dikaji oleh pesantren tradisional menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang separuh harganya dibandingkan dengan laki-laki. Diantara contohnya, fiqh yang mengajarkan orang tua untuk membeli dua ekor kambing pada kelahiran anaknya yang laki-laki, tapi hanya satu ekor kambing untuk kelahiran anak perempuan. Hal yang sama juga diterapkan pada waktu seorang mati terbunuh. Jika laki-laki keluarganya berhak menuntut ganti rugi 100 ekor unta, sedangkan untuk perempuan hanya 50 ekor unta.³⁶

Meskipun demikian tidak berarti pandangan bahwa perempuan sejajar dengan laki-laki tidak ada dalam pemikiran kitab kuning, yaitu ketika mereka memandang kedua makhluk itu melalui kacamata spiritualitas ketuhanan. Hal ini Nampak ketika mereka menafsirkan ayat Alquran yang berbunyi *inna akramakum 'indallāhi atqākum* (Q.S. al-Hujurat: 13) dan ayat lain yang berbunyi *man 'amila ṣaliḥa min ḥakar aw unṣā* (Q.S. an-Nahl: 97).

³⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 122.

³⁵ Naqiyah Mukhtar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap Syarah *'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* Karya M Umar Nawawi al-Bantani" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 VII/1997, 33.

³⁶ Masdar F Mas'udi, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 156-157.

Akan tetapi pandangan seperti ini selain hanya terdapat dalam kitab kuning, dikhawatirkan masih sebatas jargon belaka, karena penafsirannya tidak banyak dikemukakan dalam semangat persamaan secara signifikan. Pandangan yang menyejajarkan laki-laki dan perempuan tersebutnya tampaknya hanya sebatas pada kehidupan batin dan ukhrawi, tanpa perlu terefleksi dalam kehidupan sosial yang nyata.

Namun demikian, tidak berarti bahwa kitab kuning dengan segala pemikirannya harus dinilai buruk. Kitab kuning yang merupakan bangunan intelektual yang canggih merupakan produk budaya zaman pertengahan yang cenderung didominasi oleh cita rasa budaya yang secara keseluruhan sangat laki-laki sehingga mudah dimengerti jika prasangka dan kepentingan laki-laki yang mewarnai pembahasannya.³⁷ Dalam rentang waktu yang panjang dan lama, tradisi pengajaran dan pembacaan kitab ini –yang terus berlangsung hingga kini- tentu memberikan pengaruh kepada masyarakat pesantren dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, metode pendidikan. Di kalangan umat Islam, pesantren dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan baik pada sisi tradisi keilmuannya yang oleh Martin Van Bruinessen dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*) maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitas Islam.³⁸ Namun karena kurang adanya improvisasi metodologi, proses transmisi itu cenderung hanya melahirkan penumpukan keilmuan. Ilmu dianggap sebagai sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat ditambah. Proses transmisi itu merupakan penerimaan secara *taken for granted*.

Metode yang secara umum digunakan dalam proses pembelajaran di pesantren mengikuti pola tradisional yaitu metode sorogan dan bandongan. Kedua model pembelajaran

³⁷ Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 180. Lihat juga Martin Van Bruinessen, "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 173-175.

³⁸ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 17.

ini oleh beberapa pakar pendidikan dianggap statis dan tradisional.³⁹ Kiai/ustad sebagai pendidik biasanya bersifat aktif, sementara santri sebagai peserta didik pasif. Dengan demikian maka sistem pembelajaran yang dikembangkan cenderung bersifat monologis. Walaupun metode musyawarah dan halaqah sebagai metode yang kritis dan dinamis tidak bisa diabaikan, tapi cenderung tidak mendapat perhatian para peneliti.

Dengan model pembelajaran seperti ini pendidik dapat secara leluasa melakukan indoktrinasi terhadap peserta didik. Metode ini cenderung membunuh kreatifitas dan daya kritis peserta didik untuk mengetahui materi secara lebih mendalam dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Pendidikan indoktrinasi ini cenderung memaksakan nilai-nilai yang telah dianggap baku, tidak membuka ruang dialog, tidak melihat peserta didik sebagai pribadi yang unik dengan status dan martabatnya sebagai manusia yang harus dihormati.⁴⁰ Selanjutnya proses monolog ini dapat mengakibatkan kemandegan dalam pengembangan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan yang humanis, karena tujuan pendidikan Islam tidak hanya mensosialisasikan nilai-nilai yang telah ada tapi lebih dari itu adalah pengembangan nilai-nilai ajaran Islam.

Pesantren sebagai Media Pemberdayaan Perempuan

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan sejatinya mempunyai peran yang cukup penting dalam melakukan kerja pemberdayaan dan transformasi masyarakat, yang salah satunya berupa pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Upaya pemberdayaan berangkat dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan upaya membangun daya tersebut dengan mendorong, memberikan

³⁹ Saifudin Zuhri, "Reformulasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed. Ismail SM dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), 102.

⁴⁰ YB Mangun Wijaya, "Mencari Visi Dasar Pendidikan" dalam *Basis* edisi khusus dengan tema *Menggugat Dunia Pendidikan Kita*, No. 01-02 tahun ke 47.

motivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dengan disertai upaya untuk mengembangkannya.

Proses pemberdayaan mencakup beragam kegiatan di semua bidang dan pada semua level kehidupan. Yang harus disadari sejak awal adalah proses pemberdayaan perempuan harus berawal dari pikiran perempuan, dari kesadaran tentang dirinya, hak-haknya, perannya, kemampuan serta potensinya. Di samping juga kesadaran tentang bagaimana ketimpangan gender dan kekuatan politik, sosial, budaya, ekonomi yang menghambat upaya mereka dalam rangka membebaskan diri dari belenggu yang selama ini melilitnya.⁴¹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berupaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang berdasarkan Alquran dan hadis dengan tetap melestarikan nilai-nilai universal Islam, mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kitab kuning yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran di pesantren, oleh banyak kalangan dianggap masih dipenuhi nilai-nilai bias gender yang menempatkan perempuan pada posisi kedua, domestik dan marginal.⁴² Dalam rentang waktu yang panjang dan lama, tradisi pengajaran dan pembacaan kitab ini—yang terus berlangsung hingga kini—tentu memberikan pengaruh kepada masyarakat pesantren dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu yang membuatnya tidak manusiawi. Jika pendidikan yang punya hakekat dan orientasi pemberdayaan ini tidak steril dari nilai-nilai yang sarat dengan bias gender maka tidak mengherankan jika dalam masyarakat masih terjadi praktek-praktek yang tidak mencerminkan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Namun demikian terlalu berlebihan kiranya bila hanya melihat sisi negatif dari pendidikan pesantren secara umum. Tidak selamanya pendidikan pesantren pada akhirnya melahirkan *status quo*. Melalui pendidikan pesantren perempuan

⁴¹ A. Sulasikin Murpratomo, "Pengaruh Kekuasaan," 24.

⁴² Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, 90.

diharapkan dapat menjadi pribadi muslimah yang mandiri dan tangguh sehingga mampu mengatur kehidupannya, mengatasi persoalan-persoalannya serta membuatnya mampu menentukan pilihan dalam kehidupannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, yang menegaskan bahwa pendidikan punya peran penting bagi kaum perempuan, karena pendidikan akan membawa kepada keutamaan, kemuliaan, ketinggian dan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan yang seperti inilah yang akan menempatkan perempuan menjadi pribadi yang mandiri dalam menjalani kehidupannya.⁴³

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mewujudkan pendidikan pesantren yang memberdayakan perempuan adalah, *pertama*, materi atau kurikulum sensitif gender. Filosofi dari sebuah kurikulum adalah untuk mempromosikan perubahan sosial ke arah yang lebih progresif. Kitab kuning sebagai salah satu unsur mutlak dalam proses belajar mengajar di pesantren berperan penting dalam membentuk kecerdasan intelektual dan moralitas kesalehan pada diri santri.⁴⁴ Pemikiran dalam kitab kuning selain merupakan objek kajian juga harus dijadikan sebagai objek pengkajian atau studi kritis. Karangan ulama Abad Pertengahan harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial budaya dan politik. Isi kitab tidak perlu dianggap sebagai kebenaran mutlak karena merupakan cerminan budaya, kebutuhan dan pendapat mayoritas ulama pada saat kitab itu disusun.

Produk pemikiran masa lalu yang sesuai dengan konteks saat itu menemui benturan dahsyat dengan realitas saat ini yang kondisinya berbeda secara mencolok. Misalnya, hubungan laki-laki dan perempuan yang pada waktu lalu sangat timpang dan berbeda perannya karena laki-laki mampu berperan di dunia publik sementara perempuan hanya di sektor domestik. Saat ini

⁴³ M. Athiyyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 132.

⁴⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), 51.

mulai terpatahkan karena banyaknya perempuan yang mampu setara dengan laki-laki dalam bidang publik dan domestik sekaligus.

Agar materi yang diberikan memberi manfaat bagi peserta didik, materi yang dipelajari perlu menyesuaikan dengan tuntutan zaman, kesempurnaan jiwa anak didik, dengan tanpa melupakan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Sebagai contoh, materi yang diberikan di pondok pesantren, yang agaknya perlu peninjauan lebih lanjut adalah fiqh yang Syafi'iyah sementara dalam bidang teologi menganut Asy'ariyah-Maturidiyah.⁴⁵ Pada tingkat lanjutan pesantren perlu dan sudah memberikan akses pada kitab kuning yang bervariasi sebagai pengayaan dari kajian pokok. Kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* sudah menjadi kajian di pesantren, begitu juga dengan kajian teologi Ibnu Taimiyah atau Mu'tazilah sudah diakses oleh santri senior diperkenalkan.

Dengan cara ini wacana perbedaan dan berpikir alternatif mungkin tumbuh sehingga mampu meminimalisir budaya berpikir tekstual. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah pola pendidikan dan pola pikir yang dikembangkan di pesantren sudah dimodifikasi dan diintegrasikan dengan kondisi umat zaman sekarang,⁴⁶ walaupun ada yang tetap mempertahankan ciri lamanya.

Pengenalan konsep dan praktek baru dalam kurikulum pendidikan merupakan proses yang kompleks dan rumit, yang memerlukan dukungan dan keterlibatan dari pimpinan pondok dan seluruh staf pengajarnya. Partisipasi semua pihak dalam proses pengembangan kurikulum yang sensitif gender merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan implementasinya.

Kedua, metode pembelajaran kritis. Proses pembelajaran di pesantren memiliki beberapa sisi negatif di antaranya adalah hilangnya keberanian dari peserta didik untuk berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran yang ada di pesantren kurang memberikan ruang dialog karena sistemnya yang kiai

⁴⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, 19.

⁴⁶ HM. Amin Haedari et al., *Masa Depan Pesantren; dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global* (Jakarta: IRD Press, 2004), 150.

centered/teacher centered. Kreatifitas santri tidak berkembang dengan baik karena ketakutan untuk bertanya dan berbeda pendapat. Bertanya dan berbeda pendapat masih dianggap *sū'ul adab*. Inilah yang membuat metode sorogan dan bandongan belum beranjak dari orientasi *content knowledge*, dan belum mengarah pada *understanding* dan *construction of knowledge*.⁴⁷ Walaupun yang harus dipahami bahwa pola pendidikan seperti itu terutama untuk santri pemula. Di kalangan santri senior diskusi dan beradu argumentasi secara kritis biasa dilaksanakan di forum-forum halaqah dan musyawarah. Mereka tidak hanya kritis pada pandangan ulama pada lalu, tapi juga kritis padan pemikiran modern. Sementara tidak jarang akademisi yang malah hanya bisa kritis pada pandangan ulama masa lalu tapi tidak kritis terhadap pandangan pemikir modern.

Pembaharuan metode tentu saja dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah mapan. Dalam konteks ini, metode sorogan dikembangkan ke arah pemahaman materi pokok. Pembelajaran dengan sistem sorogan memungkinkan kiai/guru menguji kedalaman pengetahuan peserta didik. Sementara halaqah dan bandongan diarahkan sebagai arena debat dan dialog antar sesama santri bukan sekedar pembacaan kitab secara masal.

Sisi positif dari pembaharuan ini adalah munculnya kebiasaan untuk berani mengemukakan pendapat, beda pendapat, berpikir secara logis rasional dan menghargai perbedaan pendapat. Disamping itu, tradisi berdebat dapat mendorong santri untuk mengerti lebih banyak demi memperkuat argumennya dan mendapatkan lebih banyak dengan mendengar dan mencermati pendapat orang lain. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menekankan belajar sebagai proses menemukan dan menciptakan pengetahuan dengan mengaktifkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang sedang dihadapi.⁴⁸

⁴⁷ Saifudin Zuhri, "Reformasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, ed. Ismail SM et al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), 102-103.

⁴⁸ Leo Sutrisno, "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme," dalam Th. Sumartana, et al., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Interfidei, 2001), 205-222.

Metode penyampaian materi kitab kuning yang merupakan produk pemikiran Islam, di tingkat lanjutan dilakukan dengan terlebih dahulu menyajikan proses terjadinya produk pemikiran Islam tersebut. Dengan demikian, santri dapat mengikuti prosedur dan metode pengambilan suatu rumusan pemikiran Islam yang bersumber dari sumber aslinya. Pemberian “bahan jadi” kepada peserta didik hanya akan melatih kemampuan hapalan, yang akan melahirkan *muqallid* pasif karena kepandaiannya hanya sebatas menghapalkan bahan jadi sebanyak mungkin sementara kesadaran kritisnya tidak terlatih.

Ketiga, profesionalisme tenaga pendidik. Kitab kuning sebagai materi pembelajaran mengandung nuansa penalaran yang terbuka bagi segala macam bentuk penafsiran, namun karena cenderung diajarkan secara doktriner, peserta didik yang kebanyakan masih dalam usia perkembangan kepribadian, mengikuti pola yang ditanamkan oleh kiai/gurunya secara terus menerus. Hal ini terlihat dari ketaatan peserta didik terhadap kiai/guru secara mutlak.

Ketaatan terhadap guru yang berlebihan melahirkan sikap yang memposisikan kitab kuning sebagai sesuatu yang sakral, sehingga pantang menerima perubahan. Akibatnya santri kehilangan daya dan sikap kritisnya. Penghormatan yang tinggi seringkali menjadikan santri sebagai sosok yang pasif karena khawatir kehilangan barakah. Hal ini juga melekat pada kitab kuning yang diajarkan oleh kiai/guru. Bagi para santri, kiai dan kitab kuning merupakan sumber otoritas, bahkan sumber hukum. Oleh karena itu para pendidik harus memiliki sensitivitas gender,⁴⁹ mengerti tujuan dan manfaat dari kurikulum sensitif gender tersebut. Kepekaan dan kesadaran gender perlu ditumbuhkan sejak awal bagi kiai sebagai pimpinan pesantren

⁴⁹ Sensitivitas gender adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sensitivitas gender diharapkan mampu menjadi alat untuk melihat ketidakadilan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki di ranah domestik maupun publik. Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* (Jakarta: PPBA Depag RI, 2001), 126.

serta seluruh pengajarnya, melalui forum diskusi, seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan yang berwawasan gender. Tapi di sinipun, para santri perlu tetap memegang kritisismenya terhadap gagasan tentang gender. Jika tidak, para santri hanya akan pindah dari taklid ke kitab kuning ke taklid pada pemikiran tentang gender. Kritis kepada kitab kuning yang diimbangi dengan kritis terhadap pemikiran tentang gender.

Upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan akan dapat berhasil bila memiliki tenaga pendidik yang sensitif gender. Pendidik/guru merupakan faktor kunci dalam pemberdayaan perempuan. Agama bukanlah alat legitimasi untuk menempatkan perempuan di bawah laki-laki, melainkan justru agama merupakan referensi yang kuat yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki tapi tetap proporsional dengan melihat perbedaan antar keduanya. Karena kesetaraan tidak harus menyamakan semua hal.

Kesimpulan

Upaya rekonstruksi terhadap pendidikan pesantren merupakan hal yang selalu dilakukan untuk menampilkan wajah Islam yang santun, egaliter, adil, dan universal untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan dan juga jenis kelamin. Melalui pendidikanlah wajah Islam akan terbaca dan bersinar menerangi semesta. Untuk itu wajah pendidikan Islam harus ditampilkan untuk mengantarkan berkas-berkas sinar yang dimiliki peserta didik baik laki-laki maupun perempuan untuk menuju kematangannya. Sinar tersebut menjadi sinar yang teduh dan menyejukkan, yang semua orang akan selalu merindukan kehadirannya, bukan sinar terik yang semua orang akan menghindar darinya.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, di mana tujuannya disamping meningkatkan kualitas yang dimiliki perempuan, juga bagaimana seorang perempuan mempunyai kepribadian yang bernuansa Qur'ani atau tidak bertentangan

dengan norma-norma Islam. Melalui pendidikan pesantren, perempuan tidak hanya berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai spiritualitas yang mereka yakini. Pendidikan pesantren tidak hanya berjalan dengan mengandalkan nilai-nilai yang ada tanpa adanya konsiderasi dengan perkembangan masyarakat ataupun sebaliknya. Pada dasarnya pesantren telah melakukan pemberdayaan, tapi memang perlu dilanjutkan sehingga proses pendidikan itu memperoleh hasil yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abrasyi (al), M. Athiyyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahri. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Arifin, HM. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara:1991.
- Bruinessen, Martin Van. "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning," dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1996.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajidi dan Cicik Farha, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour. "Gerakan Masyarakat Untuk Keadilan Gender" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 5 1999.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fuad, Ariyana Wahidah. "Relevansi Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. Mursyidah Tahir. Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Haedari, HM. Amin et al. *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleks Global*. Jakarta: IRD Press, 2004.
- Hook, Sidney. "Filsafat Pendidikan John Dewey" dalam *Sidney Hook: Sosok Filsuf Humanis, Demokrat dalam Tradisi Pragmatisme*, ed. Paul Kurtz. Jakarta: YOI, 1994.
- Ilyas, Yunahar. "Perspektif Gender dalam Islam" makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema "Bias Gender dalam Dakwah" oleh PSW UII dan PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Kartini, *Surat-surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri dan Suaminya*. Jakarta; Djambatan, 1987.

- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dal al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Mas'udi, Masdar F. "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning" dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, eds. Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan H. Meuleman. Jakarta: INIS, 1993.
- Mas'udi, Masdar F. "Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning" dalam Mansour Fakih, et al. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mukhtar, Naqiyah. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning: Studi terhadap Syarah 'Uqūd al-Lujjain fi Bayān Huqūq Zaujain karya M Umar Nawawi al-Bantani," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4 VII/1997.
- Murpratomo, A. Sulasikin. "Pengaruh Kekuasaan dalam Meningkatkan martabat dan Kesejahteraan Perempuan" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. Mursyidah Tahir. Jakarta: PP Muslimat NU dan Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Purbakawaja, Soegarda. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Rahardjo, M. Dawam. "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan," ed. Dawam Rajardjo. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Rofangi, M. "Posisi Kiai dalam pengembangan Tradisi Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren: Religiusitas Iptek*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 1998.
- Sadli, Saporinah. "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif HAM" dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, eds. Tapi Omas Ihromi et al. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Saptandari, Pinky. "Tantangan dan Peluang Gerakan Perempuan dalam Menyongsong Otonomi Daerah" dalam *Jurnal Analisis Sosial: Perempuan Dalam Transisi Demokrasi dan Globalisasi*. Vol. 6 No. 1, Februari, 2001.

- Shihab, M. Quraish. "Kesetaraan Gender dalam Islam" kata pengantar *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, oleh Nasarudin Umar. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sugiyono, Sugeng. "Konsepsi Gender dalam Perspektif Islam." Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari dengan tema "Re-interpretasi Peran Gender dalam Perspektif Islam," KPSW BPP3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Sutrisno, Leo. "Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme" dalam Th. Sumartana, et al., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei, 2001.
- Tan, Melly G. "Perempuan dan Pemberdayaan" dalam *Perempuan dan Pemberdayaan*, ed. Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: PPBA Depag RI, 2001.
- Wijaya, YB Mangun. "Mencari Visi Dasar Pendidikan" dalam *Basis* edisi khusus dengan tema "Menggugat Dunia Pendidikan Kita." No. 01-02 tahun ke 47.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. "Langkah Pengembangan Pesantren" dalam *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren; Religiusitas Iptek*, ed. Abdul Munir Mulkhan. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan Pustaka Pelajar, 1998.
- Zarkasyi, Amal Fathullah. "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan dan dakwah" dalam Adi Sasono et al. *Solusi Islam atas Problematika Umat, Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Zuhri, Saifudin. "Reformulasi Kurikulum Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, eds. Ismail SM et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002.